

Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Koordinasi Antar Lembaga Terhadap Gagal Salur Program Bantuan Sosial di Kabupaten Sabu Raiju

Fanyanna Taruna Here Riwu¹, Riswanda², Nursalam³

¹⁻³Program Pascasarjana, Universitas Terbuka, Kupang

¹fanyhereriwu35@gmail.com, ²dr.riswanda@gmail.com, ³nursalamjeppu@yahoo.com

Corresponding author: fanyhereriwu35@gmail.com

Submitted: 30/08/2025; Revised: 04/09/2025; Published: 08/10/2025

DOI: <https://doi.org/10.61332/ijpa.v8i2.376>

Abstract

This study aims to analyze the influence of human resource capacity and inter-agency coordination on the failure of social assistance program distribution in Sabu Raijua Regency, a region with 3T characteristics (disadvantaged, frontier, and outermost). This study uses a quantitative associative approach. Data were collected through structured questionnaires distributed to 22 respondents directly involved in the distribution of social assistance, including officials, village officials, and program assistants. Data were analyzed using descriptive statistics and multiple linear regression. The results show that human resource capacity and inter-agency coordination, both partially and simultaneously, have a significant influence on the failure of social assistance distribution. Although the human resource capacity of program implementers is generally good in terms of procedural understanding and work experience, weaknesses were identified in digital literacy and interpersonal communication skills. Furthermore, inter-agency coordination is still hampered by data synchronization problems, weak two-way communication, and sectoral egos, which lead to delays and inaccuracies in distribution. This research recommends strengthening human resource capacity through training focused on digital technology and conflict management, as well as building an integrated data system to improve inter-agency coordination to ensure social assistance is more on target

Keywords: Human Resource Capacity, Inter-Agency Coordination, Social Assistance Distribution Failure, Public Policy, Sabu Raijua

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kapasitas sumber daya manusia dan koordinasi antar lembaga terhadap gagal salur program bantuan sosial di Kabupaten Sabu Raijua, sebuah daerah dengan karakteristik 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif. Data dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur yang disebarkan kepada 22 responden yang terlibat langsung dalam penyaluran bantuan sosial, meliputi pegawai dinas, perangkat desa, dan pendamping program. Analisis data menggunakan statistik deskriptif dan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia dan koordinasi antar lembaga, baik secara parsial maupun simultan,

berpengaruh signifikan terhadap gagal salur bantuan sosial. Meskipun kapasitas SDM pelaksana program secara umum tergolong baik dari sisi pemahaman prosedural dan pengalaman kerja, ditemukan kelemahan pada aspek literasi digital dan keterampilan komunikasi interpersonal. Lebih lanjut, koordinasi antar lembaga masih terhambat oleh masalah sinkronisasi data, lemahnya komunikasi dua arah, dan ego sektoral, yang mengakibatkan keterlambatan serta ketidaktepatan distribusi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan yang berfokus pada teknologi digital dan manajemen konflik, serta pembangunan sistem data terintegrasi untuk meningkatkan koordinasi antar lembaga guna memastikan bantuan sosial lebih tepat sasaran.

Kata Kunci: Kapasitas SDM, Koordinasi Antar Lembaga, Gagal Salur Bantuan, Kebijakan Publik, Sabu Raijua

Pendahuluan

Bantuan sosial merupakan instrumen kebijakan utama dalam upaya global menanggulangi kemiskinan dan ketimpangan sosial-ekonomi. Lembaga internasional seperti Bank Dunia dan PBB secara konsisten mendorong implementasi kebijakan bantuan sosial yang adaptif dan inklusif, terutama untuk kelompok rentan. Di Indonesia, kebijakan bantuan sosial menjadi bagian integral dari strategi pembangunan nasional, yang diwujudkan melalui program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa bantuan sosial berkontribusi signifikan dalam menahan laju kemiskinan, terutama selama pandemi COVID-19

Namun, efektivitas bantuan sosial sangat bergantung pada ketepatan sasaran, keandalan data, dan kapasitas pelaksana di lapangan. Tantangan ini menjadi lebih kompleks di wilayah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T) seperti Kabupaten Sabu Raijua, yang menghadapi keterbatasan akses, infrastruktur, dan kondisi geografis kepulauan. Di kabupaten ini, program bantuan sosial yang bersumber dari APBN dan APBD menjadi instrumen vital untuk menjamin perlindungan minimum bagi warga miskin.

Meskipun jumlah penerima bantuan terus meningkat dari tahun 2021 hingga 2023, pelaksanaannya dihadapkan pada tantangan gagal salur, yang mencakup bantuan yang tidak sampai, salah sasaran, tertunda, atau tidak sesuai jumlahnya. Fenomena ini sering kali disebabkan oleh dua faktor utama: rendahnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan lemahnya koordinasi antar lembaga. Kapasitas SDM yang terbatas, terutama dalam

keterampilan teknis pendataan digital dan komunikasi, sering menyebabkan kesalahan prosedural. Sementara itu, lemahnya koordinasi antara dinas sosial, pemerintah desa, dan bank penyalur mengakibatkan tumpang tindih peran, data yang tidak sinkron, dan kebingungan di lapangan.

Penelitian sebelumnya di daerah lain telah mengidentifikasi berbagai hambatan dalam penyaluran bantuan sosial, seperti masalah administrasi, data yang tidak valid, dan kurangnya sosialisasi. Namun, penelitian yang secara spesifik mengkaji dampak simultan dari kapasitas SDM dan koordinasi antar lembaga dalam konteks wilayah 3T seperti Sabu Raijua masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi untuk menganalisis pengaruh kapasitas sumber daya manusia dan koordinasi antar lembaga terhadap gagal salur program bantuan sosial di Kabupaten Sabu Raijua, yang hasilnya diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang efektif dan praktis.

Tinjauan Pustaka

Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Kapasitas SDM merujuk pada kombinasi pengetahuan, keterampilan, kompetensi, dan kemampuan yang dimiliki individu dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuannya. Teori

Human Capital (Becker, 1964; Schultz, 1961) menegaskan bahwa investasi pada pendidikan, pelatihan, dan pengalaman akan meningkatkan produktivitas individu. Dalam konteks penyaluran bantuan, petugas yang memiliki kompetensi teknis (misalnya, penggunaan aplikasi pendataan) dan pemahaman prosedural yang baik akan lebih mampu memastikan bantuan tersalur secara tepat sasaran dan tepat waktu. Teori Kapasitas Kelembagaan (UNDP, 2009) juga relevan, di mana kapasitas individu dan organisasi menjadi penentu keberhasilan fungsi institusi publik. Rendahnya kapasitas ini dapat menyebabkan proses verifikasi data, pengelolaan informasi, dan pelaporan menjadi tidak optimal, sehingga meningkatkan risiko gagal salur.

Koordinasi Antar Lembaga

Koordinasi antar lembaga adalah proses penyalarsan dan penyesuaian kegiatan dari berbagai unit atau instansi yang berbeda untuk mencapai tujuan bersama secara efisien. Teori Collaborative Governance (Ansell & Gash, 2008) menjelaskan bahwa koordinasi yang berhasil membutuhkan kondisi awal yang setara, desain kelembagaan yang jelas, kepemimpinan fasilitatif, dan dialog untuk membangun kepercayaan. Dalam distribusi bantuan sosial, kegagalan memenuhi elemen-elemen ini dapat menyebabkan kebijakan yang tumpang tindih atau bahkan bertentangan antar aktor. Selain itu, Teori Koordinasi Antar-Organisasi (Alexander, 1995) menyoroti pentingnya keterkaitan tugas, hubungan formal-informal, dan tujuan bersama sebagai fondasi koordinasi yang efektif. Lemahnya integrasi sistem informasi dan komunikasi lintas sektor sering menjadi faktor dominan penyebab gagal salur dalam distribusi bantuan sosial, termasuk di Kabupaten Sabu Raijua.

Gagal Salur Program Bantuan

Gagal salur adalah situasi di mana bantuan yang direncanakan tidak berhasil sampai kepada penerima yang berhak, atau penyalurannya tidak sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditetapkan. Fenomena ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kualitas data penerima yang buruk, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta masalah teknis dan administrasi dalam proses distribusi. Data yang tidak akurat menjadi salah satu penyebab utama, di mana individu yang tidak lagi memenuhi syarat tetap terdaftar, sementara yang membutuhkan justru terlewatkan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif untuk menganalisis hubungan sebab-akibat antara variabel independen (kapasitas SDM dan koordinasi antar lembaga) dengan variabel dependen (gagal salur program bantuan) di Kabupaten Sabu Raijua. Sumber informasi dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung melalui penyebaran kuesioner kepada responden,

sedangkan data sekunder didapatkan dari studi dokumentasi seperti laporan resmi dan data statistik terkait.

Populasi penelitian adalah seluruh pegawai dan pejabat yang terlibat dalam proses penyaluran bantuan di Kabupaten Sabu Raijua. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik simple random sampling dengan kriteria memiliki pengalaman minimal satu tahun dalam penyaluran bantuan. Jumlah sampel yang terjaring dan mengisi kuesioner adalah 22 responden.

Instrumen penelitian utama adalah kuesioner terstruktur yang disusun menggunakan skala Likert untuk mengukur variabel penelitian. Selain itu, digunakan pula teknik dokumentasi dan wawancara mendalam untuk memperkuat dan memvalidasi temuan dari kuesioner. Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, dimulai dengan uji validitas dan reliabilitas instrumen, diikuti analisis deskriptif untuk menggambarkan karakteristik responden dan sebaran jawaban, serta analisis regresi linier berganda untuk menguji hipotesis mengenai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial (Uji t) dan simultan (Uji F).

Sumber Informasi

Dalam penelitian ini digunakan dua jenis data yaitu:

- 1) Data Primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh perseorangan atau orang langsung melalui objeknya. Dalam hal ini data primer didapatkan melalui penelitian langsung ke pegawai dan pejabat yang terlibat.
- 2) Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung yaitu dengan memakai studi Pustaka dengan membaca dan mempelajari dari diktat buku, jurnal yang bersipat ilmiah dan berhubungan dengan masalah yang diteliti.

1) Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai dan pejabat yang terlibat dalam proses penyaluran program bantuan di Kabupaten Sabu Raijua, termasuk dari dinas terkait, lembaga penerima bantuan, serta mitra pelaksana yang bekerja dalam program tersebut.

2) Sampel

Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik simple random sampling, di mana sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan penelitian ini, yaitu:

- a. Pegawai atau pejabat yang memiliki pengalaman langsung dalam penyaluran program bantuan selama minimal 1 tahun.
- b. Anggota tim koordinasi antar lembaga terkait penyaluran bantuan
- c. Penerima manfaat atau lembaga penerima bantuan yang memiliki data penerima bantuan yang tercatat.

Jumlah sampel ditentukan berdasarkan rumus Slovin yakni minimal 5 kali jumlah indikator variabel, sehingga diperoleh estimasi 30-50 responden

Instrumen Penelitian

Instrumen Penelitian dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1) Kuesioner

Kuesioner disusun dengan pertanyaan-pertanyaan terstruktur yang berkaitan dengan variable penelitian.

- Bagian pertama berisi pertanyaan mengenai karakteristik responden.
- Bagian kedua berisi item-item untuk mengukur kapasitas sumber daya manusia, dan koordinasi antar lembaga.
- Bagian ketiga mencakup pertanyaan terkait gagal salur program bantuan, termasuk faktor-faktor yang memengaruhi

2) Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan data sekunder, seperti laporan resmi dari dinas terkait, data statistik penyaluran bantuan, dan data penerima manfaat. Data ini digunakan untuk memperkuat temuan dari hasil kuesioner dan sebagai sumber pembandingan

3) Wawancara, yakni Teknik komunikasi langsung kepada pihak-pihak yang terkait mengenai pertanyaan yang menyangkut masalah yang diteliti secara lebih mendalam

Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga metode utama, yaitu kuesioner, dokumentasi, dan wawancara. Pertama, **kuesioner** disusun dengan pertanyaan terstruktur yang mencakup tiga bagian utama: (1) pertanyaan mengenai karakteristik responden, (2) pertanyaan untuk mengukur kapasitas sumber daya manusia dan koordinasi antar lembaga, dan (3) pertanyaan terkait dengan gagal salur program bantuan. Kuesioner ini digunakan untuk mengumpulkan data primer dari responden yang terdiri dari pegawai dan pejabat yang terlibat langsung dalam program bantuan, anggota tim koordinasi antar lembaga, serta penerima manfaat bantuan.

Selain kuesioner, **dokumentasi** juga digunakan untuk memperoleh data sekunder. Ini termasuk laporan resmi dari dinas terkait, data statistik mengenai penyaluran bantuan, dan informasi tentang penerima manfaat yang dapat memperkuat temuan dari kuesioner. Dokumentasi ini penting untuk memberikan konteks dan data yang lebih lengkap mengenai program bantuan sosial yang diteliti.

Pembahasan

Hasil analisis menunjukkan bahwa kapasitas SDM secara signifikan mempengaruhi gagal salur program bantuan. Meskipun para pelaksana memiliki pemahaman prosedural dan pengalaman yang tinggi, temuan dari wawancara mendalam mengungkapkan adanya keterbatasan pada aspek keterampilan teknis, seperti penggunaan aplikasi pendataan digital, yang diperparah oleh kondisi geografis dan infrastruktur internet yang terbatas di Sabu Raijua. Selain itu, kelemahan pada soft skills, khususnya komunikasi dan manajemen konflik dengan masyarakat, juga menjadi titik rawan yang memicu kesalahpahaman di lapangan. Temuan ini sejalan dengan Teori Human Capital (Becker, 1964) yang menekankan pentingnya investasi berkelanjutan pada SDM, tidak hanya pada aspek teknis tetapi juga interpersonal, untuk meningkatkan produktivitas dan efektivitas.

Koordinasi antar lembaga juga terbukti menjadi faktor krusial. Meskipun komunikasi formal seperti rapat koordinasi rutin dilakukan, implementasi tindak

lanjutnya belum optimal. Masalah utama terletak pada ketidaksinkronan data penerima antara Dinas Sosial dan perangkat desa, yang menyebabkan data ganda atau penerima yang tidak lagi memenuhi syarat tetap terdaftar. Minimnya komunikasi dua arah dan ego sektoral antar instansi memperburuk kesenjangan informasi, yang berdampak langsung pada ketidaktepatan sasaran bantuan. Hal ini mengonfirmasi Teori Collaborative Governance (Ansell & Gash, 2008), di mana ketiadaan kepercayaan dan mekanisme kerja yang terintegrasi menghambat efektivitas kolaborasi.

Secara simultan, kapasitas SDM dan koordinasi antar lembaga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap gagal salur. Kapasitas SDM yang tinggi tidak akan efektif tanpa didukung oleh sistem koordinasi yang kuat, dan sebaliknya. Kombinasi antara rendahnya keterampilan digital petugas dengan lemahnya integrasi data antar lembaga memperbesar risiko kesalahan administrasi, keterlambatan distribusi, dan ketidaktepatan sasaran penerima.

Hasil sebaran jawaban responden merupakan tahapan dari penyajian data untuk mendeskripsikan hasil penelitian yang dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada pegawai, pejabat, perangkat desa, mitra penyalur, serta penerima manfaat yang terlibat dalam penyaluran program bantuan sosial di Kabupaten Sabu Raijua. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner berbasis Google Formulir yang disusun berdasarkan indikator variabel penelitian. Dalam penelitian ini terdapat 3 (tiga) variabel utama, yaitu Kapasitas Sumber Daya Manusia (X_1), Koordinasi Antar Lembaga (X_2), serta Gagal Salur Program Bantuan (Y).

Pada masing-masing variabel digunakan teori pendukung sebagai dasar dalam penyusunan indikator pengukuran. Skala yang digunakan adalah **skala Likert** dengan lima kategori jawaban, yaitu: Sangat Setuju (SS) dengan skor 5, Setuju (S) dengan skor 4, Netral (N) dengan skor 3, Tidak Setuju (TS) dengan skor 2, dan Sangat Tidak Setuju (STS) dengan skor 1.

Dengan jumlah responden sebanyak **22 orang**, maka perhitungan skor dilakukan sebagai berikut:

$$\text{Skor tertinggi} = 22 \times 5 = 110$$

$$\text{Skor terendah} = 22 \times 1 = 22$$

$$\text{Range skor} = \frac{110 - 22}{5}$$

$$= 18$$

Selanjutnya, range tersebut dibagi ke dalam lima kategori penilaian, yaitu:

$$22 - 39,6 = \text{Sangat Rendah}$$

$$39,7 - 57,2 = \text{Rendah}$$

$$57,3 - 74,8 = \text{Cukup Rendah}$$

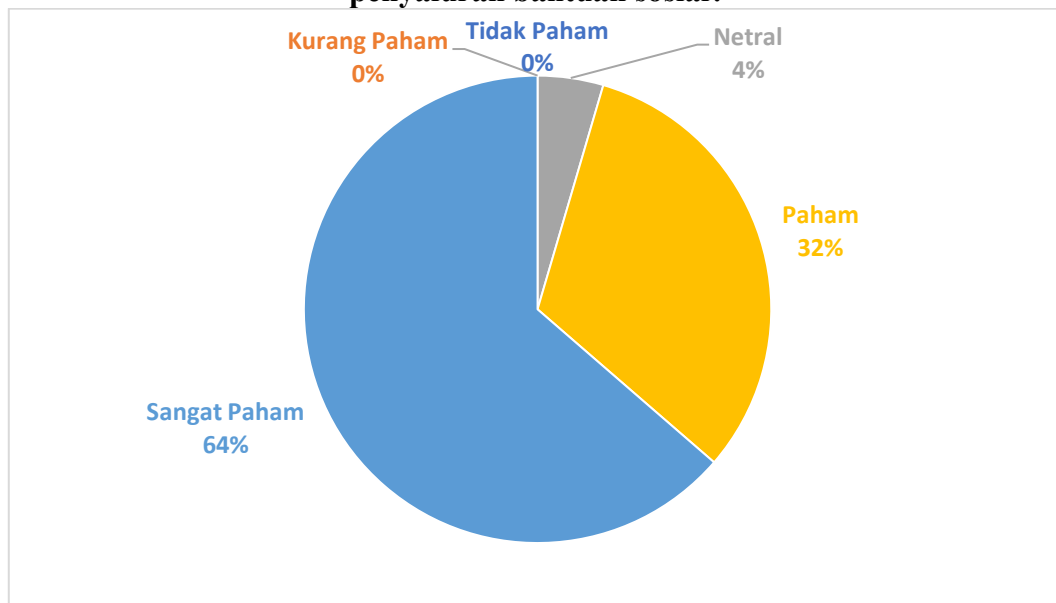
$$74,9 - 92,4 = \text{Tinggi}$$

$$92,5 - 110 = \text{Sangat Tinggi}$$

Pemaparan jawaban dari responden atas setiap pernyataan dalam kuesioner akan ditampilkan dalam bentuk tabel dan diagram, kemudian disertai uraian deskriptif serta kesimpulan mengenai hasil jawaban tersebut sesuai dengan indikator pada masing-masing variabel penelitian.

1. Analisis Dampak Kapasitas Sumber Daya Manusia

Gambar 1. Se jauh mana Anda memahami prosedur yang harus dilakukan dalam penyaluran bantuan sosial?



Berdasarkan hasil sebaran kuesioner yang ditampilkan pada Diagram 1, diketahui bahwa tingkat pemahaman responden terhadap prosedur penyaluran bantuan sosial

menunjukkan kecenderungan yang sangat baik. Sebagian besar responden, yaitu 64%, menyatakan sangat paham mengenai prosedur yang harus dilakukan dalam penyaluran bantuan sosial. Sementara itu, 32% responden berada pada kategori paham, sehingga jika digabungkan, sebanyak 96% responden menunjukkan pemahaman yang baik hingga sangat baik terhadap mekanisme penyaluran bantuan.

Di sisi lain, hanya 4% responden yang menyatakan netral, sedangkan tidak terdapat responden yang memilih kategori kurang paham maupun tidak paham. Temuan ini mengindikasikan bahwa mayoritas aparatur maupun pihak yang terlibat dalam penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Sabu Raijua telah memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai terkait prosedur yang berlaku. Kondisi ini memiliki implikasi penting bagi variabel kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam penelitian. Tingginya tingkat pemahaman prosedur mencerminkan bahwa aspek kompetensi kognitif responden berada pada kategori baik, sehingga dapat meminimalkan potensi kesalahan administratif maupun teknis yang dapat menyebabkan fenomena gagal salur. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemahaman responden terhadap prosedur penyaluran bantuan sosial menjadi salah satu indikator yang memperkuat kapasitas SDM dalam mendukung efektivitas implementasi program bantuan sosial.

2. Koordinasi Antar Lembaga

Gambar 2
Sejauh mana komunikasi antara lembaga yang terlibat dalam penyaluran bantuan sosial berjalan dengan lancar?

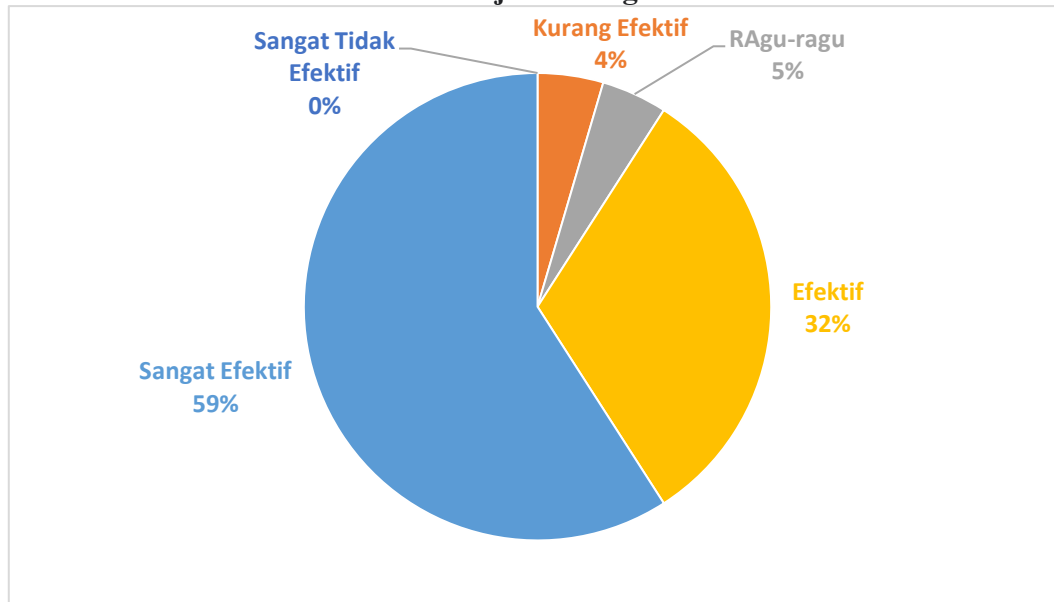


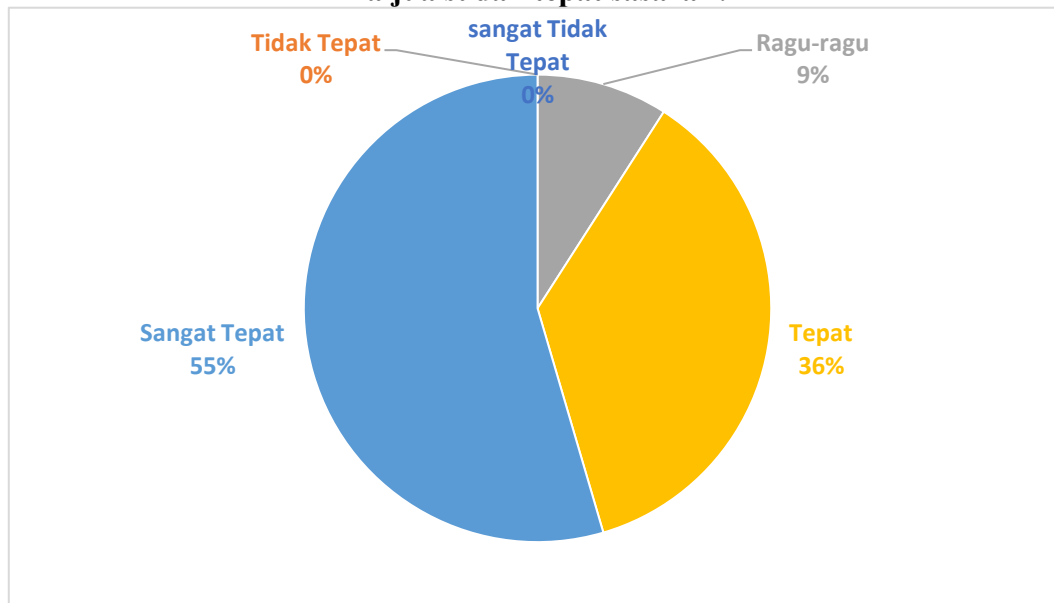
Diagram lingkaran berjudul Diagram 2 menampilkan hasil survei mengenai tingkat kelancaran komunikasi antarlembaga dalam proses penyaluran bantuan sosial. Berdasarkan data yang disajikan, mayoritas responden memiliki pandangan yang sangat positif, menunjukkan tingkat efektivitas komunikasi yang tinggi. Sebanyak 59% responden menilai komunikasi sebagai Sangat Efektif, dan 32% menilai Efektif. Jika digabungkan, 91% responden secara keseluruhan menganggap komunikasi berjalan dengan baik. Ini menyiratkan bahwa koordinasi dan pertukaran informasi antara berbagai pihak yang terlibat, seperti pemerintah, lembaga non-pemerintah, atau organisasi lain, berfungsi dengan sangat lancar.

Hanya 9% responden yang memiliki pandangan kurang positif. Angka ini terdiri dari 4% yang menilai komunikasi Kurang Efektif dan 5% yang berada di posisi Ragu-ragu. Tidak ada responden yang memberikan nilai Sangat Tidak Efektif. Persentase yang sangat rendah ini menunjukkan bahwa masalah komunikasi dalam program ini, jika ada, relatif minimal. Secara keseluruhan, hasil survei ini dapat diinterpretasikan sebagai keberhasilan dalam pengelolaan dan koordinasi program bantuan sosial. Efektivitas

komunikasi yang tinggi adalah faktor krusial dalam memastikan bantuan dapat disalurkan secara efisien, tepat sasaran, dan tanpa hambatan birokrasi yang signifikan, yang pada akhirnya akan meningkatkan dampak positif program bagi masyarakat.

3. Gagal Salur Program Bantuan

Gambar 3
Sejauh mana Anda merasa bahwa penerima bantuan sosial di Kabupaten Sabu Raijua sudah tepat sasaran?



Berdasarkan diagram lingkaran berjudul Gambar 3, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden memiliki pandangan positif terkait ketepatan sasaran penerima bantuan sosial di Kabupaten Sabu Raijua. Data menunjukkan bahwa 55% responden menilai penerima bantuan sebagai Sangat Tepat sasaran, sementara 36% lainnya menganggapnya Tepat sasaran. Secara total, 91% responden berpendapat bahwa penyaluran bantuan telah menjangkau target yang sesuai. Sebagian kecil responden, yaitu 9%, berada dalam kategori Ragu-ragu. Tidak ada responden yang memilih kategori Tidak Tepat atau Sangat Tidak Tepat.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan koordinasi antar lembaga secara parsial maupun simultan berpengaruh signifikan terhadap gagal salur program bantuan sosial di

Kabupaten Sabu Raijua. Pertama, kapasitas SDM, meskipun secara umum baik dari segi pemahaman prosedur dan pengalaman, masih memiliki kelemahan pada aspek literasi digital dan keterampilan komunikasi interpersonal yang menjadi pemicu kesalahan di lapangan. Kedua, koordinasi antar lembaga belum berjalan optimal, ditandai dengan adanya ketidaksinkronan data, komunikasi dua arah yang lemah, dan ego sektoral yang menghambat efektivitas distribusi bantuan. Kombinasi dari kedua faktor ini, diperparah oleh tantangan geografis dan infrastruktur di wilayah 3T, menjadi penyebab utama terjadinya gagal salur.

Sebagai saran, Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua perlu memperkuat sistem koordinasi dengan membangun basis data terpadu yang dapat diakses lintas instansi. Di sisi lain, peningkatan kapasitas SDM perlu terus dilakukan melalui pelatihan yang berfokus pada teknologi digital, komunikasi publik, dan manajemen konflik. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas kajian dengan meneliti dampak bantuan sosial terhadap indikator kesejahteraan masyarakat secara langsung atau melakukan studi komparatif di wilayah 3T lainnya untuk memperkaya strategi nasional dalam mengatasi fenomena gagal salur.

Daftar Pustaka

- Ab Malik, M. H., Omar, E. N., & Maon, S. N. (2020). Humanitarian Logistics: A Disaster Relief Operations Framework During Pandemic Covid-19 in Achieving Healthy Communities. *ADVANCES IN BUSINESS RESEARCH INTERNATIONAL JOURNAL*, 6(2), 101. <https://doi.org/10.24191/abrij.v6i2.11114>
- Ahmadisheykhsarmast, S., & Sonmez, R. (2020). A smart contract system for security of payment of construction contracts. *Automation in Construction*, 120, 103401. <https://doi.org/10.1016/j.autcon.2020.103401>
- Alves, A. P., Freitas, R. L. C. de, Marques, M. D., & Oliveira, R. de. (2020). Bolsa Familia Program: The perception of beneficiaries, public managers and community leaders as an instrument for evaluation in Urucuia-MG, Brazil. *International Journal of Advanced Engineering Research and Science*, 7(6), 449–459. <https://doi.org/10.22161/ijaers.76.55>
- Antony, J., & Gupta, S. (2019). Top ten reasons for process improvement project failures. *International Journal of Lean Six Sigma*, 10(1), 367–374. <https://doi.org/10.1108/IJLSS-11-2017-0130>

- Arifando, R., Yulianto, F., Mahmudy, W. F., & Sander, B. A. (2019). Hybrid Genetic Algorithm & Learning Vector Quantization for Classification of Social Assistance Recipients. 2019 International Conference on Sustainable Information Engineering and Technology (SIET), 316–321. <https://doi.org/10.1109/SIET48054.2019.8986082>
- Alexander, E. R. (1995). How organizations act together: Interorganizational coordination in theory and practice. Gordon and Breach Publishers.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Argyris, C., & Schön, D. A. (1978). Organizational learning: A theory of action perspective. Addison-Wesley.
- Bambang Shergi Laksmono, H. R. H. (2021). Operational Improvement On Data Validation And Verification Of Health Insurance Assistance Beneficiaries In Indonesia: An Overview Of Accountability/Governance Perspective. *Psychology and Education Journal*, 58(1), 2236–2247. <https://doi.org/10.17762/pae.v58i1.1101>
- Briggs, R. C. (2021). Why Does Aid Not Target the Poorest? *International Studies Quarterly*, 65(3), 739–752. <https://doi.org/10.1093/isq/sqab035>
- Becker, G. S. (1964). Human capital: A theoretical and empirical analysis, with special reference to education. University of Chicago Press.
- Boyatzis, R. E. (1982). The competent manager: A model for effective performance. Wiley.
- Cahyani, A. D. (2023). Implementasi program Bantuan Sosial Pangan (BSP) di Kelurahan Patemon Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. Diakses dari <https://eprints.walisongo.ac.id/23456>
- Domingue, S. J., & Emrich, C. T. (2019a). Social Vulnerability and Procedural Equity: Exploring the Distribution of Disaster Aid Across Counties in the United States. *American Review of Public Administration*, 49(8), 897–913. <https://doi.org/10.1177/0275074019856122>
- Domingue, S. J., & Emrich, C. T. (2019b). Social Vulnerability and Procedural Equity: Exploring the Distribution of Disaster Aid Across Counties in the United States. *The American Review of Public Administration*, 49(8), 897–913. <https://doi.org/10.1177/0275074019856122>
- Fitriani, Y., Musyarofah, S., & Haryadi, B. (2020). Problematics of Distribution of Funds in The Indonesia Pintar Program. Proceedings of the Proceedings of the 1st Conference on Islamic Finance and Technology, CIFET, 21 September, Sidoarjo, East Java, Indonesia. <https://doi.org/10.4108/eai.21-9-2019.2293957>
- Galbraith, J. R. (1977). Organization design. Addison-Wesley
- Goldstone, R. L., Andrade-Lotero, E. J., Hawkins, R. D., & Roberts, M. E. (2024). The Emergence of Specialized Roles Within Groups. *Topics in Cognitive Science*, 16(2), 257–281. <https://doi.org/10.1111/tops.12644>

- Guentherman, M., Hartman, E., Schlegelmilch, A., Brinck, E. A., & Anderson, C. A. (2021). Building a Management Information System with Inter-Agency Data Sharing to Improve Data-Based Decision Making Across Systems: Experiences From Wisconsin PROMISE. *Rehabilitation Counseling Bulletin*, 65(1), 6–22. <https://doi.org/10.1177/0034355220962182>
- Haliim, W., & Purba, D. (2023). SOCIAL AND BUREAUCRATIC PROBLEMS IN SOCIAL POLICY IMPLEMENTATION IN INDONESIA: A STUDY ON THE PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH). In *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Administrasi Negara* (Vol. 07, Issue 01).
- Hanin Dary, N., Astuti Nurhaeni, I. D., & Suharto, D. G. (2019). Public-Private Partnership In Indonesian Urban Water Sanitation And Hygiene Program: Human Resource Capacity's Innovation. *Iapa Proceedings Conference*, 448. <https://doi.org/10.30589/proceedings.2019.247>
- J, H. P. Putra., Sulfikar, & Sunardi. (2023). User Experience Analysis of Social AID Assistance Data Recipient Application using User Experience Analysis Questionnaire (UEQ) and Usability Testing Method. 2023 International Conference on Information Management and Technology (ICIMTech), 597–602. <https://doi.org/10.1109/ICIMTech59029.2023.10277960>
- Komarasari, W. (n.d.). PENGARUH KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENGENDALIAN INTERN AKUNTANSI TERHADAP KETERANDALAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH (Pada SKPD Kabupaten Bantul Bagian Akuntansi dan Keuangan).
- Lameijer, B. A., Antony, J., Chakraborty, A., Does, R. J. M. M., & Garza-Reyes, J. A. (2021). The role of organisational motivation and coordination in continuous improvement implementations: an empirical research of process improvement project success. *Total Quality Management & Business Excellence*, 32(13–14), 1633–1649. <https://doi.org/10.1080/14783363.2020.1757422>
- Mawaddah Warahmah. (2023). EFFECTIVENESS OF EDUCATIONAL PROGRAMS. *JR-ELT (Journal of Research in English Language Teaching)*, 7(1), 9–18. <https://doi.org/10.30631/jr-elt.v7i1.37>
- Morgan, P. (2006). The concept of capacity. *European Centre for Development Policy Management*.
- Noor, M. M., Abdul Munir, Z., Kaliani Sundram, V. P., Abdul Razak, N., & Mat, A. (2023). Disruption of Aid Distribution to Flood Victims During Flood Disasters in Malaysia. *Asia Proceedings of Social Sciences*, 11(1), 96–100. <https://doi.org/10.31580/apss.v11i1.2818>
- Oktha Pratiwi, N. W., Widya Utami, N., & Gede Juliana Eka Putra, I. (2022). Klasifikasi Penentuan Penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) Menggunakan Algoritma C4.5 Di Desa Keramas, Gianyar, Bali. *Jurnal Informatika, Teknologi Dan Sains*, 4(3), 101–107. <https://doi.org/10.51401/jinteks.v4i3.1667>

- Pangoriseng, M. I. (2023, 1 Oktober). Bansos Gagal Cair? Penyebabnya Bisa Karena 5 Hal Ini. Herald ID. Diakses dari <https://herald.id/2023/10/01/bansos-gagal-cair-penyebabnya-bisa-karena-5-hal-ini/>
- Putrianda, T. N., Harjono, Y., & Rizkianti, T. (2021). The Relationship between Completeness of Medical Record Information and Accuracy of The Main Diagnostic Code with Health Social Security Administration Claim Approval. Developing a Global Pandemic Exit Strategy and Framework for Global Health Security, 908–921. <https://doi.org/10.26911/ICPHmanagement.FP.08.2021.03>
- Rajakumar, P. T. V., & R., Y. (2023). Employee Competency and Understanding Capability in Gear Manufacturing Companies in Coimbatore, Tamil Nadu. Asian Journal of Management, 113–117. <https://doi.org/10.52711/2321-5763.2023.00017>
- Randolph, R. V., Hu, H., & Silvernail, K. D. (2020). Better the devil you know: Inter-organizational information technology and network social capital in coopetition networks. Information & Management, 57(6), 103344. <https://doi.org/10.1016/j.im.2020.103344>
- Rijal, S., Azis, A. A., Chusumastuti, D., Susanto, E., Nirawana, I. W. S., & Legito. (2023). Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi Bagi Masyarakat. Easta Journal of Innovative Community Services, 1(03), 156–170. <https://doi.org/10.58812/ejincs.v1i03.123>
- Rojas Trejos, C. A., Meisel, J. D., & Adarme Jaimes, W. (2023). Humanitarian aid distribution logistics with accessibility constraints: a systematic literature review. Journal of Humanitarian Logistics and Supply Chain Management, 13(1), 26–41. <https://doi.org/10.1108/JHLSCM-05-2021-0041>
- Schultz, T. W. (1961). Investment in human capital. The American Economic Review, 51(1), 1–17.
- Senge, P. M. (1990). The fifth discipline: The art and practice of the learning organization. Doubleday.
- Spencer, L. M., & Spencer, S. M. (1993). Competence at work: Models for superior performance. Wiley.
- Seputra, K. A., & Aryanto, K. Y. E. (2021). Designing an interoperable social assistance health insurance validation system. Journal of Physics: Conference Series, 1810(1), 012027. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1810/1/012027>
- Silva, J. A. M., Fernandes Agreli, H., Harrison, R., Peduzzi, M., Mininel, V. A., & Xyrichis, A. (2021). Collective leadership to improve professional practice, healthcare outcomes, and staff well-being. Cochrane Database of Systematic Reviews. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD013850>
- Singarimbun, Masri. 2011. Metode Penelitian Survei. Jakarta: LP3ES.
- Simon, H. A. (1947). Administrative behavior: A study of decision-making processes in administrative organization. Free Press.
- Sopha, B. M. (n.d.). Coordination Mechanism among Key Players during Disaster Relief Operations: A Case Study.

- Susano, A., & Subiantoro, H. (2023). HR Development Through Capacity Building To Increase Company Productivity. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 4(06), 499. <http://jiss.publikasiindonesia.id/>
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Metode Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tabiu, A., & Allumi Nura, A. (2020). Assessment of Career Planning as Predictor of Employee Performance: The Role of Perceived Career Opportunity. *Sains Humanika*, 12(2). <https://doi.org/10.11113/sh.v12n2.1607>
- Terry, George R.. 1964. *Principles of Management*. Illinois: Richard D. Irwin, Inc., Homewood, 8th ed.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Kemiskinan.
- UNDP. (2009). *Capacity development: A UNDP primer*. United Nations Development Programme.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Sosial.
- Wahyudi, A., Sartika, D., Heru Wismono, F., Erinda Ramdhani, L., Rosalina, L., Kusumaningrum, M., & Zakiyah, S. (2020). Investigating Organizational and Human Resource Capacity of Village Government: A Case Study in Kutai Kartanegara Regency. *Policy & Governance Review*, 4(2), 99. <https://doi.org/10.30589/pgr.v4i2.267>
- Yao, Y., Liu, X., & Li, Z. (2019). Robust Measurement Placement for Distribution System State Estimation. *IEEE Transactions on Sustainable Energy*, 10(1), 364–374. <https://doi.org/10.1109/TSTE.2017.2775862>
- Yopi, L., Sadhana, K., & Widjajani, R. (2023). Implementation of Regional Non-Cash Food Aid Policy, Indonesia. *EAS Journal of Humanities and Cultural Studies*, 5(05), 243–249. <https://doi.org/10.36349/easjhcs.2023.v05i05.004>
- Zinnurova, Yu. A., & Shironina, E. M. (2020a). THEORETICAL ASPECTS OF HUMAN RESOURCES CAPACITY DEVELOPMENT. *Vestnik Universiteta*, 1(12), 17–22. <https://doi.org/10.26425/1816-4277-2019-12-17-22>